



12 Saksi Kasus UPS Diperiksa

DITRESKRIMSUS Metro Jaya nampaknya benar-benar serius mengusut kasus dugaan korupsi APBD DKI 2014 dalam proyek pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) yang bemilai ratusan miliar. Guna menguak dugaan korupsi APBD itu polisi membentuk tim khusus. Hirigga kemarin (5/3), polisi sudah memeriksa beberapa orang terkait kasus tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Martinus Sitompul mengatakan tim khusus itu saling berbagi tugas ■

Mulai dari menggali keterangan dari saksi-saksi terkait proses lelang tender proyek, ada yang meninjau lokasi, dan ada yang fokus melakukan analisis kasus dugaan korupsi sebesar Rp 330 miliar tersebut.

"Selanjutnya hasil kerja tim khusus ini akan digelar untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk apa saja dokumen-dokumen lain yang dibutuhkah atau keterangan lain yang juga diperlukan. Tim husus ini nantinya juga yang akan merekomendasikan apa saja yang bisa ditingkatkan jadi penyidikan," terangnya terkait penyelidikan kasus itu, kemarin (5/3).

Dia menambahkan, penyidik akan meminta keterangan ahli dari auditor untuk menentukan kerugian negara yang diakibatkan dari kasus ini. "Bantuan ahli dalam hal ini auditor sangat diperlukan untuk memberikan informasi dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada, auditor bisa dari BPK atau BPKP," ungkap juga pejabat yang akrab disapa Martin ini.

Saat kembali ditanyakan siapa sebenarnya yang melaporkan kasus proyek pengdaan UPS dari APBD DKI Jakarta 2014 ini?. Perwira menengah Polri itu ini hanya mengatakan sebenarnya tak ada yang melaporkan kasus tersebut secara resmi. Dia berkilah kalau yang namanya kasus korupsi, meskipun tak ada pelapornya, namun polisi tetap bisa melakukan penyelidikan.

Menurutnya, taktik dan teknik yang digunakan dalam proses penyelidikan tidak dapat dibuka dengan gamblang, serta ada pula substansi penyelidikan yang tidak bisa disebutkan. "Proses penyelidikan kasus dugaan korupsi membutuhkan kerahasiaan. Sebab kalau ada pengungkapan (pemberitahuan kepada pers) saat proses penyelidikan masih berlagsung, bisa jadi ada bukti-bukti yang hilang, atau upaya penghilangan alat bukti, termasuk kemungkinan bantahan dari tersangka," cetusnya juga.

Di tempat yang sama, Kepala Sub Direktorat Tindah Pidana Korupsi (Kasubdit Tipikor) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Ajie Indra mengatakan pihaknya telah memulai penyelidikan sejak 28 Januari 2015 lalu. Dai juga mengatakan, sudah memeriksa 12 saksi. "Hari ini yang diperiksa enam saksi, dan kemarin sudah diperiksa enam saksi juga," kata Ajie.

Dari 12 saksi yang diperiksa, 10 orang perwakilan dari sekolah penerima UPS, dan dua lainnya adalah mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat berinisial AU dan mantan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat, ZS.

Selain itu, penyidik juga tengah meneliti dokumen yang terkait dalam proses lelang pengadaan UPS yang disebar kepada 49 SMA dan SMK di Jakarta tersebut. Namun menurut Ajie, belum ada satupun saksi yang diperiksa ditingkatkan statusnya menjad tersangka. Meski nantinya penyelidikan akan berkembang kepada 40 pemenang tender proyek tersebut. "Ini'kan baru bekerja, masih penyelidikan sebagai awal," pungkasnya. (ind)